

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan akar katanya dari daya atau power<sup>1</sup> yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Dan menurut Chambers pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.<sup>2</sup> Dalam pengertian lain pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>3</sup>

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap

---

<sup>1</sup>Siti Amanah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), hal. 1

<sup>2</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 24-25

<sup>3</sup>Daniel Sukalele, "*Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah*", dalam [wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah](http://wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah) diakses tgl 03 Januari 2019

empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Ekonomi dapat diartikan sebagai upaya dalam mengelola rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utama yaitu: produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemenuhan hidup dengan kendala terbatasnya sumber daya, erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.<sup>4</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber daya yang terbatas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional. Sehingga ketika ekonomi sudah berdaya maka segala pemenuhan kebutuhanpun akan dirasakan mudah dan telah menjadikan masyarakat sejahtera.

---

<sup>4</sup>Gunawan Sumodiningrat, "Membangun Perekonomian Rakyat", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 24.

## B. Strategi

### 1. Pengertian Strategi

Strategi adalah pilihan arah dan rute. Strategi merupakan cara-cara untuk mencapai tujuan jangka panjang<sup>5</sup>. Menurut Hamel dan Prahalad, menjelaskan arti strategi, yaitu:

*“Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukannya dimulai dengan apa yang terjadi. Terjadi kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.”*<sup>6</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi akan mengalami peningkatan yang senantiasa terjadi secara terus-menerus. Dan hal ini dilihat dari kacamata seorang tentang apa yang akan menjadi trend kedepannya. Oleh sebab itu strategi akan muncul berdasarkan perkiraan apa yang dapat terjadi kedepannya bukan apa yang sudah terjadi. Dengan memperkirakan apa yang akan terjadi maka akan memberikan inovasi pada pasar.

### Definisi Strategi

- a. Strategi adalah kerangka atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan dan tindakan organisasi.

---

<sup>5</sup> Tedjo Tripomo dan Udan, Manajemen Strategi, (Bandung: Rekayasa Sains, 2005), hal.18.

<sup>6</sup> Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 17

- b. Strategi adalah rencana yang ingin dicapai atau hendak menjadi apa organisasi dimasa depan dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan.
- c. Strategi adalah tindakan dan alokasi sumberdaya yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi.

Dari berbagai definisi strategi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi adalah sebuah pilihan tentang apa yang ingin dicapai dimasa depan dan bagaimana cara untuk mencapainya. Dengan strategi yang baik maka akan mampu mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi misalnya. Sehingga harus benar-benar merumuskan strategi yang tepat agar apa yang diinginkan tepat sasaran.

Strategi sebetulnya merupakan pemilihan yang dilakukan dengan matang terhadap rangkaian perbuatan atau cara yang dilakukan, sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu strategi seringkali dirumuskan sebagai runtutan tindakan atau sebuah cara yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan kinerja organisasi yang baik. Sehingga tujuan awal akan tercapai sesuai ekspektasi.

Manfaat dari strategi yaitu penyampaian visi yang ingin disampaikan, membentuk hubungan antara kekuatan dengan sebuah peluang, menggunakan kesuksesan saat ini dengan baik dan berusaha mencari peluang baru yang muncul. Mencipakan sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik, memberi pedoman agar organisasi dapat terus maju,

memberikan tanggapan atas semua respon baru yang terjadi sepanjang masa.

Strategi merupakan "game plan" (rencana tujuan) manajemen dan game plan tersebut adalah sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. Menarik dan membahagiakan pelanggan
2. Menjaga keadaan atau posisi pasar
3. Melaksanakan operasional
4. Sukses dalam bersaing
5. Mencapai tujuan organisasi

Strategi dalam penerapannya membutuhkan syarat agar penyusunan strategi berjalan secara efektif. Menurut Siagian ada tiga hal yang perlu diperhatikan<sup>8</sup>:

1. Strategi yang dirumuskan harus konsisten dengan situasi yang dihadapi organisasi
2. Strategi harus memperhitungkan secara realistis kemampuan suatu organisasi dalam menyediakan berbagai daya, sarana, prasarana dan dana untuk mengoperasikan strategi
3. Strategi yang ditentukan dilakukan secara optimal

---

<sup>7</sup> Nanang Fatah, Manajemen Strategik Berbasis Nilai, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal.70

<sup>8</sup> Bayu Gumelar, Ratih Nur Pratiwi dan Riyanto, "Strategi Pengembangan Industri Kecil Kripik Tempe Di Desa Karangtengah Prandon Kabupaten Ngawi (Studi Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Ngawi)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 1, 201, diakses pada tanggal 22 Desember 2018, pukul 09.00 WIB, hal. 57

## 2. Proses Strategi

Dalam sebuah strategi tentu adanya sebuah proses, menurut Fred R David proses strategi terdiri dari tiga tahapan, yaitu<sup>9</sup>:

### a. Perumusan strategi

Perumusan dilakukan dengan proses penyusunan langkah kemajuan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan dalam menyediakan *customer value* terbaik.

Teknik perumusan strategi yang penting dapat dipadukan menjadi kerangka kerja:

#### 1) Tahap input

Dalam tahap ini meringkas informasi sebagai masukan awal, dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi.

#### 2) Tahap pencocokan

Proses yang dilakukan adalah memfokuskan pada menghasilkan strategi alternatif yang layak dengan memadukan faktor eksternal dan internal.

---

<sup>9</sup> Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), hal. 3

### 3) Tahap keputusan

Menggunakan satu macam teknik setelah diperoleh dari input sasaran dalam mengevaluasi strategi alternatif yang telah diidentifikasi dalam tahap dua.

#### b. Perencanaan Tindakan

Langkah untuk mengimplementasikan strategi adalah membuat perencanaan strategi. Dalam tahap ini bagaimana membuat rencana pencapaian dan kegiatan yang benar-benar sesuai arahan dan strategi yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini berisui tahap-tahap kegiatan atau urutan yang harus dilakukan.

#### c. Implementasi strategi

Implementasi strategi merupakan proses dimana strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Implementasi adalah kunci sukses manajemen strategi. Tahap ini adalah tahap yang paling sulit karena memerlukan komitmen dan kedisiplinan serta pengorbanan yang tinggi.

#### d. Evaluasi strategi

Tahap akhir dalam strategi adalah evaluasi strategi. Ada tiga macam aktifitas untuk melakukan strategi adalah<sup>10</sup>:

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, Fred R. David, *Manajemen...*, hal. 5

- 1) Meninjau faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi
- 2) Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan)
- 3) Mengambil tindakan korektif, tidak berarti strategi yang sudah ada akan ditinggalkan atau strategi bahkan dirumuskan.

Sehingga dalam tahap akhir yaitu evaluasi strategi ada tiga hal yang harus dilakukan, yaitu harus dilihat faktor eksternal dan juga internal. Lalu mengukur antara realita dengan harapan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah mengambil tindakan koreksi, yaitu strategi tidak harus ditinggalkan namun bisa dirumuskan kembali.

### **3. Faktor-Faktor Strategi**

Suatu strategi harus efektif dan jelas, karena hal itu mengarahkan organisasi kepada tujuan, sehingga strategi harus memperhatikan faktor-faktor penetapan strategi, yaitu<sup>11</sup>:

#### **a. Lingkungan**

Lingkungan akan terus berubah, perubahan yang terjadi berpengaruh kepada sendi kehidupan manusia. Mengenai tingkah laku, kebiasaan, kebutuhan dan pandangan hidup masyarakat.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 15



b. Lingkungan Organisasi

Lingkungan organisasi yang meliputi segala sumberdaya dan kebijakan organisasi yang ada.

c. Kepemimpinan

Pemimpin adalah orang tertinggi dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu pemimpin harus menilai yang ada dalam lingkungan eksternal atau internal.

#### **4. Prinsip-prinsip Mensukseskan Strategi**

Hatten memberi petunjuk agar suatu strategi yang dibuat bisa sukses<sup>12</sup>:

- a. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya. Jangan membuat strategi yang melawan arus. Ikutilah arus perkembangan masyarakat, dalam lingkungan yang tentunya memberi peluang bergerak maju.
- b. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi. Tergantung ruang lingkup kegiatan. Bila ada banyak strategi maka strategi yang satu harus konsisten dengan strategi yang lain. Jangan bertentangan atau bertolak belakang. Semua strategi diserasikan satu sama lain.

---

<sup>12</sup> Salusu, J, *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2015), hlm. 72-73

- c. Strategi yang efektif harus memfokuskan dan menyatukan sumber daya dan tidak mencerai-beraikan satu dengan yang lain. Persaingan tidak sehat antara berbagai unit kerja dalam organisasi sering mengklaim sumber dayanya, membiarkannya terpisah dari unit kerja lainnya sehingga kekuatan yang tidak menyatu itu justru merugikan posisi organisasi.
- d. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik kelemahannya. Selain itu hendaknya juga memanfaatkan kelemahan pesaing dan membuat langkah-langkah yang tepat untuk menempati posisi kompetitif yang lebih kuat.
- e. Sumber daya adalah sesuatu yang kritis. Mengingat strategi merupakan sesuatu yang mungkin, anda harus membuat sesuatu yang memang layak dan dapat dilaksanakan.
- f. Strategi hendaknya memperhitungkan risiko yang tidak terlalu besar. Setiap strategi mengandung risiko, tetapi harus berhati-hati agar organisasi tidak masuk lobang yang besar, sehingga strategi harus selalu dapat dikontrol.
- g. Strategi hendaknya disusun atas dasar landasan keberhasilan yang telah dicapai dan jangan menyusun strategi di atas kegagalan

- h. Tanda-tanda dari suksesnya strategi dinampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait dan terutama dari para eksekutif dan semua pimpinan unit kerja dalam organisasi.

Strategi hendaknya tidak bertentangan dengan nilai hidup dalam masyarakat. Sehingga strategi dibuat dengan mempertimbangkan sesuai dengan etika dan kepentingan masyarakat luas. Tanpa adanya strategi maka sebuah lembaga tidak akan bisa memanfaatkan peluang baru yang ada. Strategi tidak hanya untuk mengembangkan rencana lembaga. Akan tetapi lebih dari itu, yaitu hubungan lembaga dengan pelanggannya. Strategi dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan mempertimbangkan peluang dan ancaman lingkungan eksternal, sumber daya dan kemampuan internal.

Dalam firman Allah SWT surah al-Maidah ayat 66 yang berbunyi,

وَلَوْ أَنَّهُمْ آقَا مُوا التَّوْرَةَ وَآ لِنَجِيلٍ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ  
وَمِنْ تَحْتِآرِ جُلُهِمْ مِنْهُمُآ مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُم سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (Al-Qur’an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Diantara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka.” (Al-Maidah 2:66)<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Mushaf Aisyah: Al-Qur’an dan Terjemah untuk Wanita, (Bandung: Penerbit Al-Qur’an, 2010), hal. 119

Dari surah tersebut menjelaskan bahwa dalam melaksanakan sesuatu untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan harus berpegang teguh pada aturan yang sudah dibuat (strategi) agar nantinya sebuah organisasi berjalan sesuai dengan perencanaan (strategi) yang telah dibuat sebelumnya. Penyimpangan dari perencanaan tersebut akan menyebabkan organisasi akan menjadi berbelok dan sulit untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sehingga strategi yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan baik.

## C. Pemberdayaan

### 1. Pengertian

Pemberdayaan akar katanya dari daya atau power. Pemikiran modern tentang power muncul pertama kali muncul dalam tulisan Nicollo Machiavelli dalam *The Prince*, diawal abad ke-6 dan Thomas Hobbes dalam *Leviathan* pada pertengahan abad ke-17. Dengan power yang dimiliki seseorang ataupun kelompok diharapkan untuk mendayagunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengakses berbagai teknologi, informasi, modal, dan mengembangkan ketrampilan untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Sehingga berkaitan dengan perubahan struktur sosial masyarakat.<sup>14</sup>

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka

---

<sup>14</sup>Siti Amanah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), hal. 1-2

pemberdayaan dimaknai sebagai proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan.kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya<sup>15</sup>. Sehingga pengertian pemberdayaan sendiri diambil dari kata dasarnya, yaitu daya yang artinya sebuah kekuatan. Dan pemberdayaan itu sendiri adalah proses transfer kemampuan atau kekuatan dari yang memiliki daya kepada mereka yang belum berdaya.

Pengertian “proses” adalah langkah-langkah yang sistematis dan sebuah tahap usaha merubah masyarakat yang lemah, mulai dari *knowlwdge* (pengetahuan), *attitude* (perilaku), dan *practice* (kecakapan atau ketampilan) mengarah pada pengetahuan, perilaku, dan keahlian yang baik. Dan pengertian “memperoleh” adalah mendapatkan atau meningkatkan kemampuan sehingga memperoleh keberdayaan itu sendiri. Sehingga inisiatif berdaya berasal dari masyarkat itu sendiri. Sedangkan makna “pemberian” bahwa sumber inisiatif bukan masyarakat melainkan pihak lain misal pemerintah atau agen pembangunan lain.

Sedangkan terkait dengan teori atau konsep mengenai pemberdayaan Priyono dan Pranarka menyatakan bahwa<sup>16</sup>:

---

<sup>15</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal.77

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 78

*“Pemberdayaan mengandung dua arti, yang pertama adalah to give power or authority, yang artinya memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau medelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/belum berdaya. Sedangkan art yang kedua, to give ability to or enable, yaitu memberikan kemampuan dan peluang kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu.”*

Berbeda dengan pendapat yang disampaikan Priyono dan Pranarka.

Sumodiningrat berpendapat bahwa<sup>17</sup>:

*“Pemberdayaan merupakan istilah yang sebenarnya khas Indonesia daripada Barat. Dimana jika di Barat istilah tersebut diterjemahkan menjadi empowerment, istilah tersebut benar tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan”. Empowerment dalam khasanah barat berarti “pemberian kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Dan barangkali istilah yang paling tepat adalah “energize” atau “memberikan energi”. Pemberdayaan adalah memberikan energi agar yang bersangkutan mampu bergerak secara mandiri”*

Sehingga bertolak pendapat antara Priyono dan Pranarka dengan Sumodiningrat. Bahwa untuk konteks barat sendiri pemberdayaan adalah *empowerment* atau memberikan kekuasaan. Sedangkan di Indonesia sendiri pemberdayaan adalah memberikan energi atau meningkatkan daya masyarakat. Hal tersebut bisa terjadi mengingat latar belakang sosial, budaya, politik, dan lingkungan yang berbeda dalam mengadopsi teori tersebut. Oleh karena itu dalam memahami konteks Barat dan Indonesia hendaknya berbeda. Oleh karenanya pemberdayaan yang dilakukan disesuaikan dengan latar belakang yang ada.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal 78

Dan terkait pemberdayaan, Winarni mengungkapkan terkait konsep pemberdayaan masyarakat:

*“Inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), tercipta kemandirian.”*

Sehingga dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan mencakup tiga hal, yaitu pengembangan, perkuat potensi, dan kemandirian. Sehingga pemberdayaan tidak hanya pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan akan tetapi juga pada masyarakat yang memiliki kemampuan namun masih terbatas. Sehingga dapat dikembangkan sampai terciptanya kemandirian.

Upaya untuk memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi masalah kemiskinan merupakan fenomena yang semakin kompleks. Dalam pembangunan perdesaan tidak semata-mata fokus pada pertanian. Selain itu pengembangan perdesaan juga tidak hanya terbatas pada program peningkatan kesejahteraan sosial melalui uang dan jasa. Karena ada hal yang lebih dari itu, yaitu usaha pemenuhan semua kebutuhan dengan harapan masyarakat mandiri, percaya diri, dan tidak lagi bergantung agar lepas dari belenggu hidup yang menyengsarakan.

Selain itu pemberdayaan masyarakat juga memberikan akses kepada masyarakat, lembaga, dan organisasi masyarakat dengan memperoleh/memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kualitas kehidupannya, karena penyebab ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh adanya keterbatasan akses, kurangnya kemampuan dan keahlian yang dimiliki, serta juga keadaan atau kondisi miskin yang dialami masyarakat<sup>18</sup>.

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang ada baik SDM atau SDA dengan mendorong, memotivasi dan memberi semangat kepada masyarakat agar memanfaatkan potensi yang bernilai ekonomis. Dan saat ini pemerintah mengupayakan pelaksanaan pembangunan dan memberi porsi terbesar pada pemberdayaan masyarakat, agar dapat meningkatkan keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara mandiri dan berkesinambungan. Pola ini dilakukan dengan *bottom up* dimana pelaksanaan dilapangan dilakukan atas inisiatif dan aspirasi masyarakat. Sehingga sangat diperlukan masyarakat yang mandiri.

## 2. Konsep Pemberdayaan

Konsep Pemberdayaan menurut Gunawan Sumodinigrat dapat dilihat melalui tiga sisi:

---

<sup>18</sup> Suhartini, dkk, *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*, (Pustaka Pesantren: Yogyakarta, 2005), hal. 211.



- a. Pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang
- b. Pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam memperkuat potensi tersebut, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses-akses sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, informasi, teknologi, lapangan kerja dan pasar.
- c. Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan jalan melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dan berkembang.<sup>19</sup>

Konsep pemberdayaan tidak terjadi secara individual tetapi juga secara kolektif dan semua harus menjadi bagian aktualisasi diri dan koaktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan. Pemberdayaan masyarakat yang paling penting adalah kedudukan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif, bukan penerima pasif. Karena dalam konsep pemberdayaan masyarakat pembangunan, megutamakan inisiatif, dan kreatif, dengan strategi pokok memberi kekuatan pada masyarakat. Dan konsep pemberdayaan masyarakat menjadikan iklim kemanusiaan yang

---

<sup>19</sup> Moh. Ali Azi, dkk, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 70

adil dan beradab dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, baik dibidang politik, ekonomi, dan lain-lain.

Sedangkan pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat adalah sebagai berikut<sup>20</sup>:

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua masyarakat.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala structural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan structural.
- c. Perubahan structural adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke modern, dari ekonomi lemah ke kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian
- d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak hanya cukup hanya dengan produktivitas, memberi kesempatan usaha yang sama, dan memberi

---

<sup>20</sup> Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Perspektif Ekonomi Lokal*, (Jakarta: CV. Nur Lina & Pustaka Taman Ilmu, 2018), hal. 165-166

sunikan modal, akan tetapi harus ada kerjasama atau kemitraan antara yang lemah dan maju

- e. Kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: (1) memberi peluang atau akses besar kepada aset produksi (modal), (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan, (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan, (4) penguatan industry kecil, (5) menciptakan wirausaha baru, (6) pemerataan spasial
- f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha, (2) peningkatan pengembangan SDM dan, (3) peningkatan akses sarana dan prasarana

### **3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Terdapat empat prinsip yang digunakan untuk suksesnya pemberdayaan, yaitu<sup>21</sup>:

#### **a. Kesetaraan**

Adanya kesetaraan atau kesejaajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat.

#### **b. Partisipasi**

---

<sup>21</sup> Sri Najiati, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands International – IP, 2005), hal. 54

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Untuk sampai pada tingkat tersebut memerlukan waktu dan proses pendampingan yang berkomitmen tinggi.

c. Keswadayaan atau kemandirian

Menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan dari pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit. Mereka mempunyai kemampuan menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungan, memiliki kemauan dan tenaga kerja, serta memiliki norma-norma yang sudah lama dipatuhi. Semua perlu digali untuk menjadi modal dasar bagi proses pemberdayaan.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, meskipun pada awal-awal peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Namun peran pendamping akan makin berkurang.

#### **4. Ciri Individu dan Kelompok Berdaya**

Dalam pemberdayaan sendiri ada kategori untuk individu maupun kelompok dikatakan berdaya. Dan inilah ciri-ciri tersebut<sup>22</sup>:

Ciri individu berdaya, yaitu:

- a. Mengenal kekuatan dan kekurangan
- b. Memiliki komitmen dan tanggungjawab
- c. Memiliki kemandirian dan inisiatif untuk memulai
- d. Dapat mengendalikan diri dan tidak menyalahkan individu/pihak lain
- e. Melaksanakan kerja/kegiatan secara profesional
- f. Dapat membina hubungan interpersonal dengan baik
- g. Mampu beradaptasi dengan lingkungan, dan
- h. Dapat menghargai diri sendiri dan orang lain.

Pelaksanaan pemberdayaan yang berhasil dicirikan oleh kondisi masyarakat mandiri, daya juang tinggi, inovatif, mampu bekerjasama dengan baik, dapat menentukan keputusan yang ada. Selain ada ciri individu, juga ada ciri kelompok berdaya, yaitu:

- a. Memiliki visi dan misi yang jelas
- b. Ada kerjasama dalam mencapai tujuan
- c. Kepemimpinan yang situasional
- d. Adanya program dan kegiatan usaha produktif

---

<sup>22</sup>Siti Amanah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), hal. 3-4

- e. Adanya komunikasi yang efektif dan pembelajaran
- f. Adanya sarana dan prasarana kelompok
- g. Adanya tekanan untuk berkinerja yang lebih baik lagi
- h. Adanya proses kaderisasi dan pembinaan anggota

## 5. Tujuan Pemberayaan Masyarakat

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu atau masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan<sup>23</sup>. Yang mana kemandirian masyarakat disini adalah keadaan yang dialami masyarakat untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu dengan menggunakan kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, efektif, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Empat keadaan yang harus diperhatikan tersebut memiliki pengertian, yaitu kognitif merupakan kemampuan berfikir yang didasari pengetahuan seseorang untuk mencari solusi yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan perilaku yang terbentuk yang diarahkan kepada perilaku sensitive terhadap nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kemampuan psikomotorik adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mendukung masyarakat

---

<sup>23</sup>Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal. 80

dalam menjalankan aktivitas pembangunan. Dan kondisi afektif adalah *sense* yang dimiliki seseorang diharapkan dapat mencapai keberdayaan.

Dan untuk mencapai kemandirian masyarakat maka diperlukan proses secara bertahap. Dengan adanya proses belajar dari waktu ke waktu maka akan diperoleh kecakapan atau kemampuan untuk menuju masyarakat yang mandiri. Dalam upaya pemberdayaan sendiri akan dihadapkan pada kondisi dimana bahwa tahap awal masyarakat masih lemah dan bahkan belum memiliki daya. Dan bisa kita lihat bahwa di kota masih ada juga masyarakat yang belum berdaya yaitu masyarakat miskin. Namun itu juga masih terjadi di masyarakat desa. Untuk meningkatkan kelompok tersebut maka perlu menambahkan kompetensi sebagai berikut<sup>24</sup>:

- a. Mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan kelompok
- b. Mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang akan dicapai dan menentukan skala prioritas
- c. Mampu menemukan dan menyepakati bagamiana cara dan alat apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang telah disetujui.
- d. Mampu bekerja sama rasional dalam bertindak untuk mencapai tujuan

Untuk itu kompetensi-kompetensi tersebut sangat diperlukan untuk mendukung masyarakat agar mampu memikirkan, mencari dan menentukan solusi terbaik untuk kedepannya. Selain itu kompetensi ini

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 82

juga nantinya dapat digunakan untuk menentukan atau merumuskan strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan proses belajar harus dilakukan secara terus-menerus.

## **6. Tahap-Tahap Pemberdayaan**

Dalam menjaga kemandirian perlu dilakukannya pemeliharaan semangat dan penigkatan kemampuan agar tidak mengalami stagnan atau bahkan kemunduran. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat dilakuka secara bertahap. Dan tahap-tahap yang harus dilakukan adalah sebagai berikut<sup>25</sup>:

1. Tahap penyadaran diri dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan penigkatan kapasitas diri
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan, pengetahuan, kecakapan, ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal. 83



Sehingga sangat perlu diperhatikan dalam pemberdayaan haruslah dilakukan melalui tahap-tahap. Yang mana terdiri dari tiga tahap, tahap pertama adalah tahap penyadaran. Dari adanya penyadaran ini diharapkan masyarakat akan memiliki kesadaran akan potensi yang ada pada dirinya harus diberdayakan. Sehingga seorang yang semula tidak mengetahui akan potensinya diharapkan di tahap ini mereka akan mengerti. Kedua adalah tahap perubahan, pada tahap ini setelah masyarakat menyadari potensinya maka diharapkan adanya perubahan. Dan terakhir adalah peningkatan kemampuan, dimana masyarakat diharapkan lebih kreatif dan inovatif.

Serangkaian tahapan yang ditempuh melalui pemberdayaan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**

**Tahap Pemberdayaan *Knowledge, Attitudes, Practice* dengan Pendekatan Aspek Afektif, Kognitif, Psikomotorik dan Konatif**

<b>Tahap Afektif</b>	<b>Tahap Kognitif</b>	<b>Tahap Psikomotorik</b>	<b>Tahap Konatif</b>
Belum merasa sadar dan peduli	Belum memiliki wawasan	Belum memiliki ketrampilan dasar	Tahap berperilaku membangun
Tumbuh rasa kesadaran dan kepedulian	Menguasai pengetahuan dasar	Menguasai ketrampilan dasar	Bersedia terlibat dalam pembangunan
Memupuk semangat kesadaran dan kepedulian	Mengembangkan pengetahuan dasar	Mengembangkan ketrampilan dasar	Berinisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan
Merasa membutuhkan kemandirian	Mendalami pengetahuan pada tingkat	Memperkaya variasi ketrampilan	Berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan

	yang lebih tinggi		lingkungan
--	-------------------	--	------------

Pada tabel tersebut memberikan tingkatan dengan jelas bagaimana peningkatan afeksi, kognisi, psikomotorik, dan konatif dalam pembangunan masyarakat. Masyarakat akan mengalami proses yang tidak singkat dan melalui berbagai tahapan. Bahkan dari tahapan satu ketahapan selanjutnya membutuhkan waktu yang lama. Sehingga tidak bisa untuk dipaksakan. Dan jika itu terjadi malah akan menimbulkan boomerang bagi masyarakat dan juga pemerintah.

## 7. Sasaran Pemberdayaan

Dalam pemberdayaan ada sasaran yang akan diberdayakan dan menurut Schumacher memiliki pandangan bahwa pemberdayaan merupakan bagian dari masyarakat miskin dengan tidak menghilangkan ketimpangan structural. Masyarakat miskin juga memiliki daya untuk itu “ kail jauh lebih tepat daripada memberikan ikan”. Selain itu NGO merupakan suatu agen yang mendapat posisi penting penting karena bersifat entrepreneur, berpengalaman jika dibanding pemerintah. Dan pemberdayaan ini ada tiga pilar yang harus dipertemukan. Yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat<sup>26</sup>.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sasaran pemberdayaan adalah masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin sangat perlu dibantu untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal. 90

Sehingga masyarakat miskin akan terberdaya, dan sebenarnya mereka memiliki daya untuk itu. Tinggal perlu adanya pemberdayaan yang mengarahkan, menuntun dan pada akhirnya mandiri. Seperti yang dikatakan bahwa lebih baik memberi kail daripada ikan. Dari situ maka masyarakat miskin tidak akan sekedar diberi sesuatu yang sifatnya akan habis. Namun masyarakat diarahkan agar mereka memiliki kemampuan untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan. Oleh karenanya perlu adanya sinergi dari tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan itu semua.

## 8. Manfaat Pemberdayaan

Ken Blanchard, *et. al* , mengatakan bahwa pemberdayaan pegawai memberikan keuntungan. Adapun keuntungan tersebut adalah sebagai berikut:

*“Karyawan yang berdaya, maka akan memberikan suatu keuntungan bagi dirinya dan juga organisasi. Hal demikian terjadi karena di dalam sebuah organisasi yang berdaya pegawai akan memberikan sumbangan gagasan terbaiknya dan juga inisiatif terbaiknya untuk lingkungan kerja, dengan rasa gembira, memiliki dan bangga. Selain itu mereka akan bertanggungjawab dan mengutamakan organisasi.”*<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hal.242

Jadi pemberdayaan akan memberikan keuntungan bagi dua belah pihak, yaitu bagi individu dan organisasi. Maka akan terjadi hubungan yang erat bagi keduanya. Dengan berdayanya individu akibat motivasi yang dimiliki maka ia akan merasa bahagia, dihargai dan merasa ikut memiliki dalam menjalankan semua tanggungjawabnya pada organisasi. Sehingga kinerja mereka akan bagus dan tentu akan berpengaruh pada kemajuan organisasi. Sebab mereka akan mencurahkan tenaganya dan inovasi-inovasinya dengan senang hati atau tanpa paksaan.

Ken juga berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang secara penuh sulit ditemukan dan juga implementasinya. Namun banyak pemimpin yang beranggapan bahwa pemberdayaan itu mudah dan dapat dilakukan dengan cepat. Ini sangat berbanding dengan pendapat Ken. Memang kelihatannya akan mudah namun dalam pemberdayaan butuh proses dan waktu yang panjang, tidak semudah dan cepat yang dilihat. Oleh karena itu pihak inovator harus memberikan dukungan, arahan dan semangat untuk kelompok masyarakat agar mereka mau mewujudkannya.

Selain itu Sedarmayanti juga mengemukakan pendapatnya sebagai berikut<sup>28</sup>:

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hal. 245

*“Manfaat pemberdayaan Sumber daya manusia dalam organisasi adalah: a) sebuah alat manajemen dalam memberdayakan sumber demi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan; b) pembaruan manajemen untuk meningkatkan kinerja sebuah organisasi; c) sebagai pelopor terhadap organisasi dalam memanfaatkan peluang untuk meningkatkan dan memajukan organisasi; d) mediator terhadap pihak lain dalam meningkatkan kinerja sebuah organisasi; e) sebagai pemikir dalam pengembangan organisasi.”*

Menurut *Asian Development Bank* (ADB), pembangunan merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat komprehensif jika memiliki lima karakteristik jika<sup>29</sup>:

- a. Basisnya lokal
- b. Orientasi pada peningkatan kesejahteraan
- c. Sifatnya holistik
- d. Berkelanjutan

Pemberdayaan berbasis lokal adalah sebuah perencanaan sekaligus pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan pada tempat atau lokasi setempat serta adanya keterlibatan sumber daya lokal dan hasilnya juga akan dinikmati masyarakat setempat. Sehingga akan ada prinsip daya saing yang dilakukan secara kompetitif. Dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat akan memberikan kesempatan masyarakat lokal untuk andil sebagai pelaku di dalamnya dan tidak hanya sebagai penonton saja. Karena mereka adalah pelaku pembangunan itu sendiri.

---

<sup>29</sup> Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hal. 99

Pemberdayaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan adalah fokus kepada pencapaian kesejahteraannya bukannya meningkatkan hasil produksi. Sehingga hal ini merubah prinsip-prinsip yang selama ini dianut dalam pembangunan yang menekankan pada pemenuhan variabel ekonomi makro. Dan upaya untuk pemberdayaan itu sendiri dilakukan dengan cara melakukan kemitraan antara pelaku orang lokal dengan orang yang kaya. Dengan adanya kemitraan diharapkan agar membuka pengetahuan, teknologi, pasar, modal dan terkait masalah bisnis.

Pemberdayaan masyarakat bersifat holistik dimana mencakup semua aspek yang ada. Oleh karenanya sumber daya lokal harus didayagunakan. Dengan tujuan agar masyarakat tidak akan tergantung dari siapapun dan dari apapun. Contohnya saja seorang petani tidak hanya dididik untuk bergantung pada sektor pertanian. Namun mereka harus memiliki skill minimal dibidang lain. Karena ketergantungan yang berlebihan akan menyebabkan penurunan produksi, kenaikan biaya produksi, penurunan pendapatan, dan penurunan kesejahteraan.

Pemberdayaan masyarakat akan mencapai prinsip berkelanjutan jika pembangunan tersebut programnya dibuat dan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan dari sisi ekonomi dan juga sosial. Keberlanjutan ekonomi akan tercipta bila tidak ada eksploitasi ekonomi dari pelaku yang kuat terhadap yang lemah. Sedangkan keberlanjutan sosial berate tidak merusak dan juga melawan aturan sosial, sistem dan nilai

sosial. Sehingga adanya keseimbangan antara keberlanjutan dari segi ekonomi maupun dari segi sosial.

Adapun proses pemberdayaan masyarakat seperti yang terangkan oleh United Nations<sup>30</sup>:

1) *Getting to know the local community*

Mengetahui terlebih dulu karakteristik masyarakat lokal yang nantinya akan diberdayakan, termasuk didalamnya juga perbedaan karakteristik yang membedakan antara masyarakat desa satu dengan desa lain.

2) *Gathering knowledge about the local community*

Mengumpulkan pengetahuan menyangkut informasi terkait masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut adalah informasi faktual tentang distribusi penduduk terkait dengan umur, pekerjaan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, nilai sikap, ritual, *custom*, jenis pengelompokan, faktor kepemimpinan (formal maupun non formal).

3) *Identifying the local leaders*

---

<sup>30</sup> Zubaedi, Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik , (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 77-79

Adanya dukungan dari pimpinan atau tokoh masyarakat setempat. Sebab seorang pemimpin atau tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam masyarakat.

4) *Stimulating the community to realize that it has problems*

Perlu adanya pendekatan persuasif untuk memecahkan masalah dan juga kebutuhan yang harus dipenuhi. Sehingga dorongan dalam komunikasi untuk menyadarkan dan merasakan bahwa mereka mempunyai masalah.

5) *Helping people to discuss their problem*

Memberdayakan berarti merangsang masyarakat untuk berusaha mendiskusikan apa masalahnya dan merumuskan solusi pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

6) *Helping people to identify their most pressing problems*

Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan agar masyarakat mampu mengidentifikasi masalah yang menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus didahulukan atau diutamakan pemecahannya.

7) *Fostering self-confidence*

Dan tujuan utama dari pemberdayaan adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Karena rasa percaya diri adalah sebuah modal utama untuk berswadaya bagi masyarakat.

8) *Deciding on a program action*



Masyarakat diberdayakan untuk membentuk atau menetapkan sebuah program yang akan dilakukan. *Program action* akan dibentuk berdasarkan skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dan tentu program yang memiliki skala tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

9) *Recognition of strengths and resources*

Pemberdayaan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan faham bahwa mereka memiliki kekuatan dan sumberdaya yang bisa dimobilisasi untuk memecahkan masalah sekaligus memenuhi kebutuhan mereka.

10) *Helping people to continue to work on solving their problems*

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya tahap pendek melainkan akan berlangsung secara berkesinambungan. Untuk itu masyarakat diberdayakan agar dapat memecahkan masalah secara kontinu juga.

11) *Increasing peoples ability for self-help*

Dan tujuan lain dari pemberdayaan adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat mandiri ialah yang telah mampu menolong dirinya sendiri.

Ada dua usaha untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dijalankan. Pertama, mempersiapkan diri masyarakat untuk menjadi wirausaha. Dengan memberikan bekal pelatihan merupakan hal penting ketika akan mulai memasuki dunia kerja. Untuk itu perlu adanya program

pembinaan. Dan program pembinaan untuk menjadi wiraswata dapat dilakukan dengan cara:

Bantuan motivasi moril tersebut berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya dimana manusia diwajibkan untuk beriman, beribadah, dan bekerja dengan semaksimal mungkin dan memasrakan segala hasilnya kepada Allah SWT. Bentuk motivasi moril, yaitu:

a. Pelatihan usaha

Dalam pelatihan ini peserta akan diberikan pengetahuan tentang konsep eirusahaan dengan segala bentuk permasalahan didalamnya. Dalam pelatihan ini tujuannya untuk memberikan wawasan yang sangat banyak, sehingga akan menumbuhkan motivasi kepada masyarakat. Sehingga melalui pelatihan ini diharapkan dapat menghindari kegagalan sekecil mungkin dalam usahanya.

b. Permodalan

Keuangan merupakan salah satu modal terpenting dalam dunia usaha. Dan bantuan modal bisa didapat dari lembaga keuangan. Namun sebaiknya pinjaman yang dilakukan di lembaga keuangan bukan untuk modal awal, melainkan untuk modal pengembangan usaha. Karena saat usaha menunjukkan perkembangan profit yang baik, maka lembaga keuangan tidak mau membantu.

Bentuk pemberdayaan yang kedua yaitu, dengan pendidikan. Karena dengan pendidikanlah SDM akan menjadi lebih baik. Dan bentuk dari pemberdayaan di bidang pendidikan adalah melalui pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dan penyediaan sarana dan prasarana tempat belajar formal atau non formal.

## 9. Model Pemberdayaan

### a. Model Pemberdayaan di Indonesia<sup>31</sup>

Dari model pemberdayaan masyarakat yang ada di Indonesia terdapat tiga model, antara lain:

*Pertama*, model pembangunan nasional berorientasi terhadap pembangunan. Model ini terfokus hanya pada pertumbuhan pendapatan nasional saja. *Kedua*, model pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar. Dalam model ini terfokus pada kemiskinan masyarakat yang terjadi. Dimana dalam pemenuhan kebutuhan dasar mencakup memperoleh penghasilan dan akses pelayanan publik (pendidikan, transportasi, kesehatan, dan lain-lain). *Ketiga*, model yang terfokus pada manusia. Pembangunan bukan sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

---

<sup>31</sup>Adib Susilo, "Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2 Agustus 2016, <http://www.ejournal.uu.ac.id/index.php/JES/article/view/368/10>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019, pukul 21. 42 WIB

Melainkan yang paling penting adalah partisipasi nyata dari masyarakat itu sendiri.

Dari adanya model pemberdayaan yang demikian. Yang paling terpenting adalah model yang paling tepat atau pas. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan itu sendiri. Sehingga masyarakat bisa berperan dan memberikan sumbangsih dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dan harapannya nanti dapat memberikan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat itu sendiri. Masyarakat dituntu untuk kreatif, aktif, kuat dan mandiri dalam era globalisasi ini.

b. Model Pemberdayaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam sendiri sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW terkait konsep pemberdayaan seperti prinsip keadilan, persamaan, partisipasi, penghargaan etos kerja, dan tolong menolong.

a. Prinsip Keadilan

Dalam al-Qur'an kata keadilan menempati posisi ketiga terbanyak setelah kata Allah dan 'Ilm. Keadilan disini adalah keadilan yang bersyarat akhlak Islam. Keadilan pada masyarakat muslim termasuk didalamnya dalam mendistribusikan kekayaan, keadilan dalam kesempatan dalam bekerja, dan juga keadilan dalam segi apapun. Dalam keadilan ini tidak memandang ras, agama, dan bahasa.

b. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan ini adalah manusia memang tercipta dengan segala perbedaan namun dalam hak dan kewajibannya sebagai hamba Allah mereka memiliki kesamaan antara hak dan kewajiban. Perbedaan yang ada dari segi kemampuan, amal dan usaha yang dilakukan. Dan Islam juga memandang status sosial bukanlah masalah perbedaan. Dikarenakan yang membedakan manusia dihadapan Allah adalah tingkan keimanan dan ketaqwaannya. Sehingga setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk berdaya .

c. Prinsip Partisipasi

Partisipasi merupakan hal yang pokok dalam pemberdayaan masyarakat dan juga adalah proses interaksi yang berkelanjutan. Dalam partisipasi tentu melibatkan peran masyarakat untuk aktif membangun diri dan kehidupannya. Pada zaman Rasulullah SAW masyarakat sudah diajari untuk berpartisipasi membangun negara sebagai pengabdian pada masyarakat. Sehingga pemberdayaan harus melibatkan peran aktif masyarakat agar mereka berdaya dan mandiri.

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Etos Kerja

Etos adalah kepercayaan, kebiasaan, karakteristik sikap manusia. Sedangkan kerja adalah amalan yang memiliki kebaikan

dan keberkahan didalamnya. Dalam Islam diajarkan untuk bekerja keras sehingga manusia mampu berdaya. Karena dalam Islam sendiri hukum bekerja adalah fardhu. Dengan bekerja manusia juga bisa memiliki kehidupan yang layak serta bisa melangsungkan kehidupan dari rezeki yang diperolehnya.

e. Prinsip Tolong-menolong

Tolong-menolong yang memiliki arti berbuat baik. Dimana merupakan kegiatan atau amal kebaikan yang dilakukan atas dasar mencari ridho Allah. Islam mengajarkan untuk saling membantu untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi misalnya. Dalam berbagai kegiatan apapun harus saling bahu-membahu tidak memandang itu anak-anak, orang tua laki-laki, perempuan, kaya dan miskin. Sebab untuk menjadi masyarakat yang berdaya haruslah saling membutuhkan.

## 10. Strategi Pemberdayaan

Priyono mengungkapkan strategi pemberdayaan masyarakat terdiri dari<sup>32</sup>:

---

<sup>32</sup> Aji Fany Permana, "Konseptualisme Tentang Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa", At-Thoriq, *Jurnal Ilmiah Studi Keislaman dan Sosial*, Volume 15, No. 1, September 2016, ISSN 2088-8539, [http://www.academia.edu/37615231/JURNAL\\_AT-THARIQ\\_Konseptualisasi\\_Tentang\\_Strategi\\_Pemberdayaan\\_Ekonomi\\_Masyarakat\\_Desa.pdf](http://www.academia.edu/37615231/JURNAL_AT-THARIQ_Konseptualisasi_Tentang_Strategi_Pemberdayaan_Ekonomi_Masyarakat_Desa.pdf), diakses pada tanggal 2 Maret 2019 pukul 05.30 WIB

- a. Pengembangan sumber daya manusia
- b. Pengembangan kelembagaan kelompok
- c. Pemupukan modal masyarakat (swasta)
- d. Pengembangan usaha produktif
- e. Penyediaan informasi tepat guna

Kemudian untuk penjelasan lebih rinci disampaikan oleh Wrihatnolo dan Didjowijoto terkait strategi pemberdayaan. Dimana terdapat 3 strategi pemberdayaan masyarakat, yaitu<sup>33</sup>:

- a. Pemberdayaan yang hanya berkuat di daun dan ranting (pemberdayaan konformis)

Struktur sosial, politik, dan ekonomi merupakan pemberian, pemberdayaan cukup meningkatkan daya terhadap struktur yang sudah ada sebelumnya. Dan bentuknya adalah merubah mental yang tidak berdaya dan memberi bantuan (modal atau subsidi). Konsep ini disebut "*Magical Paradigm*"

- b. Pemberdayaan yang hanya berkuat di batang (pemberdayaan reformis)

Dimana struktur sosial, ekonomi, poliik, dan budaya tidak ada masalah. Masalah terjadi pada kebijakan operasional. Pemberdayaan fokus pada operasional dengan melakukan perbaikan pada kualitas

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hal.43

sumber daya manusia, penguatan lembaga, dan sebagainya. Sehingga model pemberdayaan ini mengubah dari *top down* menjadi *bottom up*. Konsep ini disebut “*Naive Paradigm*”

c. Pemberdayaan yang berkuat di akar (pemberdayaan struktural)

Ketidakterdayaan dialami dalam struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya kurang memberikan peluang kepada masyarakat lemah, sehingga struktur harus ditinjau ulang. Dimana pemberdayaan dipandang sebagai perobohan tatanan yang ada.

Semua tatanan dianggap salah dan hal ini harus dimusnahkan, seperti memfasilitasi masyarakat untuk melaawan pemerintah, memprovokasi orang miskin melawan orang kaya, dan lain sebagainya. Konsep ini disebut “*Critical Paradigm*”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam strategi pemberdayaan terdapat lima hal yang harus diperhatikan, yaitu terkait sumber daya manusia, kelembagaan, modal, usaha produktif, dan informasi tepat guna. Sehingga untuk memberdayakan masyarakat harus benar-benar memperhatikan kelima hal tersebut. Sedangkan tiga cara strategi pemberdayaan yang lain dilakukan dengan tiga konsep, yaitu *magical*, *naive* dan *critical paradigm*.

Islam adalah agama Rohmatan lil’alamin, di dalam Islam diajarkan lah sebuah perilaku tolong-menolong dalam hal kebajikan dan taqwa.



Karena banyak sekali manfaat yang dirasakan saat semua manusia mau untuk menjalankan perintah Allah dan salah satunya adalah sikap tolong-menolong. Oleh karenanya tolong-menolong ini harus dalam hal kebajikan dan taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”* (QS. Al- Maidah: 2)<sup>34</sup>

Dengan adanya tolong-menolong maka akan menciptakan persaudaraan, persatuan dan kasih sayang. Adapun salah satu bentuk dari tolong-menolong adalah tidak membiarkan saudaranya dalam ketidakberdayaan. Sehingga adanya tolong-menolong antar saudara seperti halnya yang dilakukan BUMDes Kembang Jati. BUMDes tidak hanya berdiam diri melihat masyarakat desa tidak berdaya. Oleh karena itu BUMDes melakukan pemberdayaan. Sehingga akan sangat membantu masyarakat untuk maju dan sejahtera. Karena ekonomi mereka terangkat dan masyarakat akan terberdayakan.

---

<sup>34</sup> Mushaf Aisyah: Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita, (Bandung: Penerbit Al-Qur'an, 2010), hal. 106

## **D. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

### **1. Pengertian BUMDes**

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>35</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa BUMDesa adalah sebuah kelembagaan lokal atau lembaga usaha milik desa yang mana menaungi semua usaha di desa dengan tujuan untuk menyejahterakan perekonomian masyarakat desa.

### **2. Landasan Hukum BUMDes**

Dasar pembentukan BUMDes UU No. 32 Tahun 2004 pasal 213 yang bunyinya<sup>36</sup>:

- a. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
- b. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

---

<sup>35</sup>Undang-undang Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek, Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 1 , Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1

<sup>36</sup> Yuli Widyastuti, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), skripsi, [http://www.repository.radenintan.ac.id/1445/1/Skripsi\\_Widyastuti.pdf](http://www.repository.radenintan.ac.id/1445/1/Skripsi_Widyastuti.pdf), diakses pada tanggal 4 Maret 2019, pukul 21. 35 WIB

- c. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan

Kemudian dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pemetintah membuat bab BUMDes pada Bab X Badan Usaha Milik Desa dalam pasal 87:

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usah Milik Desa yang disebut BUMDes
- b. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan
- c. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonom dan/atau pelayanan umum sesuai dengan jetentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintahan No. 72 Tahun 2005, dan diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDes. Sedangkan untuk Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek BUMDes diatur dalam Nomor 7 Tahun 2017.<sup>37</sup>

### 3. Maksud dan Tujuan BUMDes

Maksud pendirian BUMDes, yaitu<sup>38</sup>:

- a. Menumbuhkembangkan perekonomian desa

---

<sup>37</sup> Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Kembang Jati, 2018, Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, hal. 1

<sup>38</sup>Ridwan, Bumdes Sebagai Katalisator Kemajuan Ekonomi Desa, Penyuluhan di Dusun Pulau Kerakap Kecamatan Pelayang Kab. Bungo Tahun 2016, *Jurnal Pengabdian KITA*, ISSN:2549-8020, vol 1 No 2 (2017), <http://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/PKITA/index>

- b. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa
- c. Menyelenggarakan kemandirian umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa
- d. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa

Tujuan yang ingin dicapai BUMDes dalam pembangunan desa yaitu<sup>39</sup>:

- a. Menetapkan kelembagaan perekonomian desa
- b. Menciptakan kesempatan berusaha
- c. Mendorong peran pemerintahan desa dalam menaggulangi kemiskinan
- d. Meningkatkan pendapatan asli desa
- e. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa
- f. Memberikan kesempatan usaha
- g. Membuka lapangan pekerjaan

BUMDes memiliki dua tujuan, yang pertama yaitu sosial dan yang kedua adalah komersial. Untuk itu masing-masing tujuan harus memang benar-benar dibedakan. Karena dua tujuan tersebut memiliki sifat yang berbeda. Tujuan sosial digunakan untuk memberikan subsidi atau bantuan kepada merke masyarakat desa yang memang perlu mendapatkan bantuan.

---

<sup>39</sup>Herlina, *Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Di Desa Pekan Tua Kecamatan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir)*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), hal. 37

Sedangkan tujuan komersial sendiri ditujukan lebih kepada mencari keuntungan.

Ada 4 agenda pokok untuk mengoptimalkan peran BUMDes, yaitu<sup>40</sup>:

1. Pengembangan dan penguatan kelembagaan
2. Penguatan kapasitas. Mencakup pemberdayaan, pelatihan, dan fasilitas secara berjenjang.
3. Penguatan pasar, setelah BUMDes berdiri diharapkan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, perluasan pasar dan mendapatkan fasilitas akses terhadap berbagai sumber daya
4. Keberlanjutan, mencakup pengorganisian, forum advokasi, dan promosi sehingga mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan terutama masyarakat dan dunia usaha.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk pengoptimalan BUMDes harus dilakukan dengan empat agenda seperti yang sudah disebutkan diatas. Agar BUMDes mampu berkembang dan berkelanjutan untuk kedepannya sehingga tidak akan ada yang namanya BUMDes pasif dan bahkan mati.

Ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial lain, yaitu<sup>41</sup>:

---

<sup>40</sup> B. Winarto, *Peran BUMDes "Mandiri" Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Joho Kecamatan Purwantoro*, <http://eprint.umpo.ac.id/3615/>, diakses pada 31 Agustus 2018, pukul 07.00 WIB

- a. Badan usaha dikelola dan dimiliki secara bersama oleh desa
- b. Modal sebesar 51% berasal dari desa dan 49% dari masyarakat yang merupakan penyertaan modal
- c. Kegiatan operasional berdasarkan falsafah bisnis berasal dari budaya lokal
- d. Bidang usaha berdasarkan pada potensi dan informasi pasar
- e. Keuntungan diperuntukkan mensejahterakan anggota dan masyarakat melalui kebijakan desa
- f. Diberi fasilitas oleh Pemerintah, Pemrov, Pemkab, dan Pemdes
- g. Kegiatan operasional dipantau bersama (Pembdes, BPD, dan anggota)

#### **4. Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes**

Pendirian BUMDes merupakan upaya untuk menampung kegiatan ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola desa untuk meningkatkan perekonomian desa, optimalisasi pengelolaan aset desa, membukal lapangan pekerjaan, peluang pasar, dan juga kesejahteraan masyarakat. Untuk itu BUMDes memiliki prinsip diantaranya adalah<sup>42</sup>:

---

<sup>41</sup>Ratna Aziz Prasetyo, "Peranan BUMDes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Dialektika Volume XI No.1*, Tahun 2016

<sup>42</sup> Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Kembang Jati, 2018, Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, hal.25

a. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan usahanya.

b. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus sukarela memberikan dukungan untuk kemajuan usahanya.

c. Emansipatif

Semua komponen yang ada di BUMDes harus diperlakukan sama tanpa pandang suku, ras, dan agama

d. Transparan

Aktivitas terhadap kepentingan masyarakat umum harus diketahui masyarakat dengan mudah dan terbuka

e. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan

f. Sustainable

Kegiatan usaha BUMDes harus dapat dikembangkan dan dilestarikan masyarakat dalam wadah BUMDes.

## 5. Pendapatan Asli Desa

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat(1) Keuangan Desa adalah semua hak dan

kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pasal 72 Ayat(1), disebutkan sumber pendapatan desa berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset,swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Menurut penjelasan dari undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) haruf a yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.



## 6. Lingkup Kegiatan BUMDes<sup>43</sup>

BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang mengelola usaha di desa dapat menysasar atau membidik sektor usaha yang potensial untuk dikembangkan seperti, perdagangan (commerce), industry (industry), dan jasa (services).

Dari usaha diatas kegiatan usaha BUMDes dapat berupa<sup>44</sup>:

- a. Lembaga keuangan mikro pedesaan/usaha simpan pinjam
- b. Pengelolaan air bersih bentuk HIPPA atau HIPAM
- c. Pasar desa
- d. Agribisnis di bidang pertanian, peternakan dan perikanan
- e. Usaha jasa transportasi

Dalam mengelola usaha yang ada di BUMDes hendaknya manusia memanfaatkan SDA sebaik mungkin dan SDM harus bisa menjaga kelestariannya alam dengan baik sehingga tidak akan terjadi kerusakan dimana-mana. Karena sangat perlu SDM yang baik agar pemanfaat SDA yang dikelola bisa berjalan baik pula. Karena banyak sekali kerusakan saat ini terjadi. Seperti dalam firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum: (30:41)

---

<sup>43</sup> Ridwan, Bumdes Sebagai Katalisator Kemajuan Ekonomi Desa, Penyuluhan di Dusun Pulau Kerakap Kecamatan Pelayang Kab. Bungo Tahun 2016, *Jurnal Pengabdian KITA*, ISSN:2549-8020, vol 1 No 2 (2017), <http://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/PKITA/index>, hal.2

<sup>44</sup>*Ibid.*, hal. 2

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ  
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١)

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Ruum)(30: 41)<sup>45</sup>.

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia tidaklah boleh rakus dalam kehidupan ini. Karena dalam kehidupan ini harus terjadi keseimbangan, yaitu keseimbangan lahiriah dan batiniah, antara dunia dan akhirat. Sehingga kerusakan itu tidak akan terjadi sebab manusia saling mau menjaga. Karena masih banyak saat ini dijumpai dalam mengelola dan juga memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dengan seenaknya tanpa memikirkan dampak bagi lingkungan dan juga generasi yang akan datang. Sehingga dalam pemanfaatan sumber daya BUMDes tidak boleh melakukan eksploitasi. Sehingga sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan baik SDM atau SDAny.

## **E. Perekonomian Masyarakat**

### **1. Pengertian Perekonomian Masyarakat**

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikos atau Oiku dan Nomos yang artinya peraturan rumah tangga. Pengertian ekonomi adalah

---

<sup>45</sup>Mushaf Aisyah: Al-Qur’an dan Terjemah untuk Wanita, (Bandung: Penerbit Al-Qur’an, 2010), hal. 408

semua yang menyangkut hal-hal berkaitan dengan kehidupan rumah tangga tertentu saja yang dimaksud dan mengenai perembangannya kata rumah tangga bukan hanya menuju pada sebuah keluarga di dalamnya terdapat suami, istri, dan anak-anak, tetapi yang dimaksud rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara, dan dunia<sup>46</sup>.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah hal-hal yang memiliki hubungan dengan rumah tangga, rumah tangga disini merujuk pada rumah tangga yang lebih luas bukan sekedar rumah tangga dengan skala kecil. Sehingga ekonomi merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang kehidupan seperti kebutuhan hidup mulai dari proses produksi, distribusi dan sampai pada tahap akhir yaitu konsumsi.

Adapun pengertian lain dari ekonomi, yaitu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas (*limited resources*), seperti tanah, tenaga kerja, dan kapital, ke dalam produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas (*unlimited wants*)<sup>47</sup>. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan cara untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas.

Adapun ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan

---

<sup>46</sup> Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra acana Media, 2010), hal. 1

<sup>47</sup> Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006), hal.9.

ekonomi masyarakat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya apapun yang dapat dikuasainya, dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya. Upaya pembangunan ekonomi masyarakat mengarah pada perubahan struktur yaitu memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional.

Kegiatan ekonomi rakyat merupakan sektor kegiatan perekonomian yang secara informal dilaksanakan oleh rakyat kecil atau sering juga disebut kegiatan ekonomi wong cilik. Sehingga kegiatan ekonomi dilakukan oleh masyarakat. Karena sektor yang dijalankan adalah sektor informal dan masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan hidup atau menghidupi dirinya sendiri.

Menurut Bambang Ismawan mengatakan bahwa dalam wacana teori ekonomi, untuk istilah ekonomi rakyat tidak bisa ditemui. Ekonomi rakyat sendiri memang bukan sebuah turunan mazhab pemikiran (*school of thought*) tertentu, akan tetapi pemahaman dari kenyataan yang ada di negara berkembang<sup>48</sup>. Sehingga bisa disebut sebuah kenyataan ekonomi dimana selain adanya sektor formal yang kegiatannya didominasi oleh usaha besar ternyata ada juga sektor informal yangmana anggotanya

---

<sup>48</sup> Hikmat Kusumaningrat, *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 7

kebanyakan masyarakat. Dam masyarakat dalam hal ini menghidupi dirinya sendiri.

## 2. Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Menurut Mubyarto, pengembangan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga segi, yaitu<sup>49</sup>:

- a. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang tanpa daya atau kekuatan.
- b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Dalam memperkuat potensi ekonomi rakyat ini, upaya pokok adalah meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan serta memanfaatkan peluang ekonomi.
- c. Mengembangkan ekonomi rakyat juga berarti melindungi masyarakat dan mencegah persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat di atas golongan yang lemah.

Dalam pengembangan ekonomi rakyat sendiri dapat dilihat dengan membuat keadaan agar potensi yang dimiliki masyarakat dapat

---

<sup>49</sup> Ismail Humaidi, "Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Industri Kecil, Studi Terhadap Masyarakat Di Sentra Industri Kecil Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Jawa Timur", *Skripsi Pengembangan Masyarakat Islam*, 2015

berkembang. Memperkuat potensi ekonomi yang dipunyai masyarakat. Sehingga potensi yang sudah dimiliki dari awal lebih diperkuat lagi untuk selanjutnya. Dan yang terakhir adalah melindungi dan mencegah persaingan yang tidak sehat serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi kuat terhadap golongan ekonomi lemah. Karena dalam pengembangan ekonomi tidak hanya terus meningkatkan perekonomian saja namun harus melindungi beberapa aspek sehingga nantinya ekonomi akan berkembang dengan baik dan tidak mengalami halangan yang berarti.

### **3. Kegiatan Pelaku Ekonomi Rakyat**

Kegiatan yang dilakukan pelaku ekonomi rakyat, yaitu<sup>50</sup>:

a. Kegiatan primer dan sekunder

Contohnya adalah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pengrajin kecil, produsen makanan kecil, penjahit, dan sebagainya

b. Kegiatan tersier

Contohnya adalah transportasi, kegiatan sewa-menyewa (perumahan, tanah, dan alat produksi)

c. Kegiatan jasa lain

Contohnya adalah tukang cukur, penyemir sepatu, montir, juru potret jalanan dan sebagainya.

### **4. Dampak Ekonomi**

---

<sup>50</sup> Hikmat Kusumaningrat, *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 8

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dampak secara umum adalah suatu pengaruh yang kuat yang menimbulkan akibat yaitu positif ataupun negatif<sup>51</sup>. Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak dalam konteks strategi pemberdayaan BUMDes atau ekonomi kreatif ini merupakan suatu akibat yang muncul baik dalam bentuk positif ataupun negatif. Menurut Alfian dampak industri kreatif atau industrialisasi yang terjadi dalam masyarakat dapat ditinjau dari:

- a. Dari sudut ekonomi, keberhasilan industri akan menyebabkan perubahan dalam struktur perekonomian masyarakat.
- b. Dari sudut sosial, industry menghasilkan perubahan struktur sosial dimana sebagian besar masyarakat bergantung pada sektor industry
- c. Dari segi budaya, industri menghasilkan perubahan nilai dan pola hidup masyarakat.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat dampak positif yang terjadi:

- a. Penyerapan tenaga kerja
- b. Peningkatan pendapatan

Dan dari penjelasan diatas juga terkait adanya dampak negatif yang muncul:

- a. Adanya perubahan pola hidup masyarakat

---

<sup>51</sup><https://kbbi.web.id/dampak>, diakses pada tanggal 1 Januari 2019, pukul 23.14 WIB

b. Kerusakan lingkungan

Dalam usaha mencari atau memenuhi kebutuhan ekonomi, sangat dianjurkan kepada umat Islam hendaklah beribadah dan berusaha, seperti bekerja dengan cara yang baik. Perlu diingat pula jika dalam mencari ekonomi (bekerja) hendaklah tetap melaksanakan ibadah sholat. Dan utamakan sholat baru kemudian mencari rezeki dari Allah. Seperti dalam QS. Al-Jum'ah (62:10)

فَإِذَا قُضِيَتْ صَلَوةٌ فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jum'ah)(62: 10)<sup>52</sup>

Ayat ini menjelaskan dan memberi motivasi untuk manusia, bahwa bekerja adalah suatu kebutuhan yang mana hasilnya akan diperoleh sesuai dengan usaha yang sudah dilakukan. Dengan usaha tersebut manusia akan memperbaiki ekonominya. Dan ketika bekerja secara giat maka Allah akan menambahkan rezekinya dan pada akhirnya perekonomian masyarakat akan semakin meningkat.

## F. Penelitian Terdahulu

---

<sup>52</sup>Mushaf Aisyah: Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita, (Bandung: Penerbit Al-Qur'an, 2010), hal. 553



Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Hayyuna dkk<sup>53</sup> bertujuan untuk mengetahui strategi manajemen aset BUMDes dalam meningkatkan PADes. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa BUMDes Sekapuk telah berkontribusi dalam meningkatkan PADes tahun 2010-2012. Persamaan penelitian ini terletak pada penelitian tentang strategi. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi objek yang diteliti, penelitian terdahulu tujuannya untuk meningkatkan PADes saja sedangkan penelitian sekarang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Reza M. Zulkarnaen<sup>54</sup> bertujuan untuk mengetahui pengembangan BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dalam pengembangan BUMDes dibuat pendampingan dan pelatihan agar tercipta perekonomian yang mandiri. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi objek yang diteliti, penelitian terdahulu meneliti pengembangan potensi desa, sedangkan penelitian yang sekarang adalah strategi BUMDes. Selain itu penelitian terdahulu melihat dampaknya pada kesejahteraan masyarakat,

---

<sup>53</sup> Rizka Hayyuna, dkk, "Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa", *JAP*, Vol. 2, No. 1, Hal 1-5, <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/330>, diakses tanggal 19 September, pukul 20.45W IB

<sup>54</sup>Reza M. Zulkarnaen, "Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha MilikDesa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta", *ISSN 1410 – 5675, Vol. 5, No. 1 Mei 2016: 1-4*, <http://journal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/viewFile/11430/5226>, diakses pada 18 September 2018, pukul 05.15 WIB

sedangkan penelitian sekarang melihat dampaknya pada peningkatan perekonomian masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Edy Yusuf<sup>55</sup> bertujuan untuk mengetahui kondisi dan tata kelola BUMDes yang sedang berkembang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan meningkatkan perekonomian. Namun ada kendala dalam pengelolaannya (jenis usaha terbatas, SDM terbatas, dan partisipasi masyarakat rendah). Persamaan penelitian ini terletak pada untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah jenis penelitian, penelitian sekarang jenis penelitiannya adalah studi kasus, dan perbedaan lokasi objek yang diteliti, penelitian terdahulu meneliti pengembangan desa mandiri, sedangkan penelitian yang sekarang adalah strategi pengembangan BUMDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Rio Halomoan<sup>56</sup> bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam pengembangan BUMDes, faktor pendukung BUMDes Mitra Usaha Mulya dan penghambat BUMDes

---

<sup>55</sup>Edy Yusuf Agunggunanto, dkk, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis", Vol. 13 No. 1 Maret 2016, <https://ejournal.uninu.ac.id/JDEB/article/view/395/753>, diakses pada 18 September 2018, pukul 05.45 WIB

<sup>56</sup>Rio Halomoan, "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2014 (Studi: BUMDes Desa Mitra Usaha Mulya Dan BUM Desa Langkitin di Kecamatan Rambah Samo)", *JOM FISIP Vol. 4 No. 1 Februari 2017*, <https://media.neliti.com/media/publications/209222-strategi-pemerintah-daerah-dalam-pengemb.pdf>, diakses pada 8 September 2018, pukul 06.45.00 WIB

Langkitin. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah strategi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu memberi kontribusi dalam meningkatkan perkembangan BUMDes. Perkembangan BUMDes Mitra Usaha Mulya berhasil namun BUMDes lain masih terdapat beberapa hambatan. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu dilakukan di dua BUMDes, sedangkan penelitian sekarang dilakukan di satu BUMDes. Selain itu penelitian terdahulu meneliti faktor penghambat dan pendukung BUMDes, sedangkan penelitian yang sekarang meneliti dampak, kendala dan solusi.

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Nursetiawan<sup>57</sup> bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan desa melalui BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah strategi untuk mencapai desa mandiri dilakukan dengan implementasi inovasi di setiap sendi BUMDes dan optimalisasi aset desa untuk kesejahteraan masyarakat. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada strategi melalui inovasi BUMDes, sedangkan penelitian sekarang strategi yang dibutuhkan BUMDes untuk peningkatan ekonomi.

---

<sup>57</sup> Irfan Nursetiawan, “*Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDes*”, Vol. 4 No. 2, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1488/1208>, diakses pada 18 September 2018, pukul 07.00 WIB

Penelitian yang dilakukan oleh Helmel Willy Amanda<sup>58</sup> bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan desa dalam meningkatkan PADes melalui BUMDes pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah BPAM dalam BUMDes dibutuhkan oleh Desa Ketapanrame selain untuk memberikan air bersih juga menambah pendapatan asli desa. Strategi BUMDes pada BPAM bisa dikatakan sudah optimal untuk mensejahterakan masyarakat. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti strategi dalam meningkatkan PADes, sedangkan penelitian sekarang strategi pemberdayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Waris, dkk<sup>59</sup> bertujuan untuk menyiapkan nelayan Kabupaten Parigi Moutong agar berdaya non teknologi dan teknologi perikanan dan budidaya, sehingga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah fenomenologi kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah perlu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan

---

<sup>58</sup> Helmel Willy Amanda, "Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)", *Vol. 3 No. 5, 2015*, <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/11820>, diakses pada 18 September 2018, pukul 07.00 WIB

<sup>59</sup> Irwan Waris dkk, "Studi Tentang Pemberdayaan Nelayan Di Pesisir Pantai Teluk Tomini Dalam Upaya Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Parigi Moutong", *Prosiding Seminar Nasional KSP2K, Vol. 2, No. 1 (2017)*, <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/ksppk/srticle/download/638/464>, diakses pada 30 Oktober 2018, pukul 09.15 WIB

nelayan, perlu perumusan strategi pemberdayaan nelayan, pemberian akses modal dan pengembangan melalui BUMDes misalnya. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang strategi pemberdayaan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah nelayan sedangkan penelitian sekarang objek penelitiannya adalah BUMDes. Selain itu perbedaannya adalah penelitian terdahulu memakai metode fenomenologi kualitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan kualitatif studi kasus.

Penelitian yang dilakukan oleh Aji Wahyudi<sup>60</sup> bertujuan untuk mengetahui implementasi rencana strategis badan pemberdayaan dalam mengembangkan BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah mengkaji peran pemerintah daerah melalui analisis rencana strategis yang dilakukan BPMD untuk mengembangkan BUMDes telah dilaksanakan atau diimplementasikan dengan baik. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang strategi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu melihat implementasi rencana strategis yang sudah ada, sedangkan penelitian yang sekarang meneliti tentang strategi pemberdayaan yang cocok untuk BUMDes.

---

<sup>60</sup>Aji Wahyudi, "Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaeingain Barat", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, Vol. 2 No. 2 pp 101-105 2016, ISSN 2302-2698, <http://ejournalfia.ub.ac.id>, diakses pada 30 Oktober 2018, pukul 05.45 WIB

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kirowati dan Lutfiyah Dwi Setia<sup>61</sup> bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan mandiri melalui BUMDes dan peran modal sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Temboro di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan melalui BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif Hasil penelitian yang diperoleh adalah manfaat dapat dirasakan setelah pengembangan BUMDes oleh warga desa Temboro, yaitu dengan menciptakan usaha baru, penyerapan tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberi kontribusi pada masyarakat dan memberi dampak pada ekonomi perdesaan dan budaya masyarakat. Peran modal sosial, kerjasama yang kuat dan norma yang tercermin dapat diterapkan secara baik dalam pengelolaan BUMDes. Persamaan penelitian ini objek yang diteliti sama-sama BUMDes. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang pengembangan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penelitian sekarang meneliti strategi dan peningkatan perekonomian.

Penelitian yang dilakukan oleh Cut Irma Alfandri, dkk<sup>62</sup> bertujuan untuk mengetahui bentuk kegiatan keluarga nelayan di Gampong Langkak Kecamatan

---

<sup>61</sup>Dewi Kirowati dan Lutfiyah Dwi Setia, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa", *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 1 Edisi 1 Mei 2018 p-ISSN:2528-6145 dan E-ISSN: 254-3198*, <http://journal.pnm.ac.id/index.php/aksi/article/view/213>., diakses pada tanggal 22 Desember 2018, pukul 14.06 WIB.

<sup>62</sup>Cut Irma Alfandri, dkk, "Strategi Pemberdayaan Wanita Nelayan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Gampong Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya", *Jurnal Ilmiah*

Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga, dan rencana strategi perempuan nelayan dalam meningkatkan ekonomi di Gampong Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah strategi wo sebagai rencana strategi pemberdayaan wanita nelayan. Strategi wo yaitu memanfaatkan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada. Adapun bentuk kegiatan adalah bertani, jemur udang, sabu dan buruh pabrik. Persamaan penelitian ini adalah strategi pemberdayaan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah wanita nelayan dan strategi yang dipakai adalah SWOT. Sedangkan penelitian sekarang objek penelitiannya adalah BUMDes dan tidak memakai strategi SWOT.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukamto<sup>63</sup> bertujuan untuk mengetahui model strategi pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat kabinet Indonesia kerja dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah strategi pemerintah dalam pemberdayaan adalah model kebijakan pemberdayaan ekonomi dari bawah ke atas (bottom up), yang menasional

---

*Mahasiswa Pertanian Unsyah, Volume 3, Nomor 4 November 2018,*

<http://jjm.unsyiah.ac.id/JFIP/article/view/9513>., diakses pada tanggal 3 Maret, pukul 22.15 WIB.

<sup>63</sup>Sukamto, "Formulasi Strategi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabinet Indonesia Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam", <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/malia/article/download/378/283/>., Diakses pada tanggal 3 Maret, pukul 22.30 WIB.

sehingga menjadi salah satu pilar penyangga kekuatan ekonomi nasional dengan industry basis keunggulan lokal. Diantaranya dengan melalui program mengurangi beban penduduk miskin, bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarg Harapan, penyediaan Kartu Keluarga Sehat. Persamaan penelitian ini adalah strategi pemberdayaan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah kabinet Indonesia kerja. Sedangkan penelitian sekarang objek penelitiannya adalah BUMDes.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Aris Prasetyo<sup>64</sup> bertujuan untuk mengetahui keterlibatan perangkat desa dan masyarakat dalam pemanfaatan dana BUMDes, mengetahui pola pemanfaatan dana, mengetahui kontribusi BUMDes di desa Pejambon dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah partisipasi masyarakat masih kurang sebab pengetahuan tentang BUMDes masih minim. Pola pemanfaatan lebih banyak pada pembangunan fisik sedangkan kontribusi untuk pemberdayaan masyarakat masih kurang sebab masalah anggaran BUMDes. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti pemberdayaan dan objeknya sama-sama BUMDes. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang

---

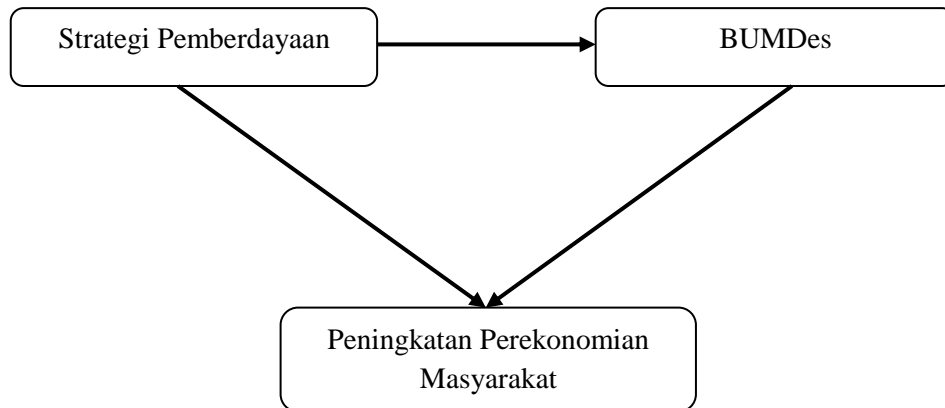
<sup>64</sup>Ratna Aris Prasetyo, "Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Dialektika Volume XI No. 1 Maret 2016*,  
[https://www.researchgate.net/publication/317088682\\_Peranan\\_Bumdes\\_dalam\\_Pembangunan\\_dan\\_Pemberdayaan\\_Masyarakat\\_di\\_Desa\\_Pejambon\\_Kecamatan\\_Sumberrejo\\_Kabupaten\\_Bojonegoro](https://www.researchgate.net/publication/317088682_Peranan_Bumdes_dalam_Pembangunan_dan_Pemberdayaan_Masyarakat_di_Desa_Pejambon_Kecamatan_Sumberrejo_Kabupaten_Bojonegoro)



peranan BUMDes. Sedangkan penelitian sekarang membahas strategi. Dan perbedaannya lagi adalah penelitian terdahulu menggunakan kuantitatif, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendekatan kualitatif.

## G. Kerangka Pemikiran

**Diagram 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Keterangan:

Strategi pemberdayaan sangat diperlukan dalam BUMDes. Karena ketika strategi pemberdayaan yang dilakukan BUMDes berjalan dengan baik maka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat